



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dapat disusun serta dapat kami sajikan dengan baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memberikan pelayanan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023–2026 yang berisi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muna Barat beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat ini, kami sampaikan melalui *website*: munabarat.go.id sebagai upaya transparansi kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat kepada masyarakat serta disampaikan pula kepada Deputi Kunwas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi *e-SAKIP Reviu*. (esr.menpan.go.id).

Dalam Laporan ini juga, kami sudah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan dari Devisi Kunwas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan melalui hasil evalausi SAKIP tahun sebelumnya (tahun 2023). Besar harapan kami penyelenggaraan pemerintahan dapat semakin baik dari tahun ke tahun jika ditinjau dari segi perencanaan kerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga dapat berimplikasi kepada semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna Barat.

Untuk tahun 2025 sudah terjadi transisi kepemimpinan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Defenitif, sehingga RPJMD 2025-2030 mulai dilakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Tentu pada tingkat perangkat daerah juga terjadi penyusunan RENSTRA 2025-2030 untuk menjadi dasar perencanaan program dan anggaran lima tahun ke depan.

Demikian laporan ini dapat kami sampaikan, terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi atas tersusunnya laporan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laworo 18 Maret 2025

Bupati Muna Barat



IKTISAR KINERJA

Pada dasarnya Akuntabilitas Kinerja Instantasi Pemerintah (AKIP) ini, merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Muna Barat Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024, Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih *independen* melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dan dari segi pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat, yang diukur melalui pencapaian 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Utama, pada tahun 2024 dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini tentu merupakan kerja keras semua elemen aparat Pemerintah bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas demi mewujudkan 4 tujuan Kabupaten Muna Barat yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026, yaitu : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Memantapkan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkedilan dan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKTISAR KINERJA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT	1
1.2. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN MUNA BARAT	3
1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MUNA BARAT	3
1.4. SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT	9
1.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT	10
1.6. SISTEMATIKA LAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023-2026	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024	14
2.3 RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. PENGUKURAN KINERJA UTAMA TAHUN 2024	17
3.2. ANALISIS CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	17
3.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	39
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muna Barat atas Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2020-2024.....	5
Tabel 1.2 PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (M Rupiah).....	7
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2024	12
Tabel 2.2 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2024	13
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2.5 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.....	15
Tabel 3.1 Tujuan 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya saing	17
Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	18
Tabel 3.3 Tujuan 2. Indkes Kemantapan Infrastruktur dan Lingkungan Daerah ..	19
Tabel 3.4 Tujuan 3. Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	20
Tabel 3.5 Tujuan 4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	21
Tabel 3.6 Indikator Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat	22
Tabel 3.7 Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	27
Tabel 3.8 Umur Harapan Hidup Saat Lahir	27
Tabel 3.9 Indikator Sasaran 3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar Masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman	29
Tabel 3.10 Indikator Sasaran 4. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Wilayah	31
Tabel 3.11 Indikator Sasaran 5. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	33
Tabel 3.12 Hasil Pengukuran kinerja sasaran Kualitas Lingkungan Hidup	33

Tabel 3.13 Indikator Sasaran 6. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah Ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan Agropolitan	34
Tabel 3.14 Indikator Sasaran 7. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	35
Tabel 3.15 Indikator Sasaran 8. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	36
Tabel 3.16 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.17 Indikator Sasaran 7. Meningkatnya transparansi dan kualitas Pelayanan Publik	38
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Tahun 2024	39

DAFTAR GAMBAR

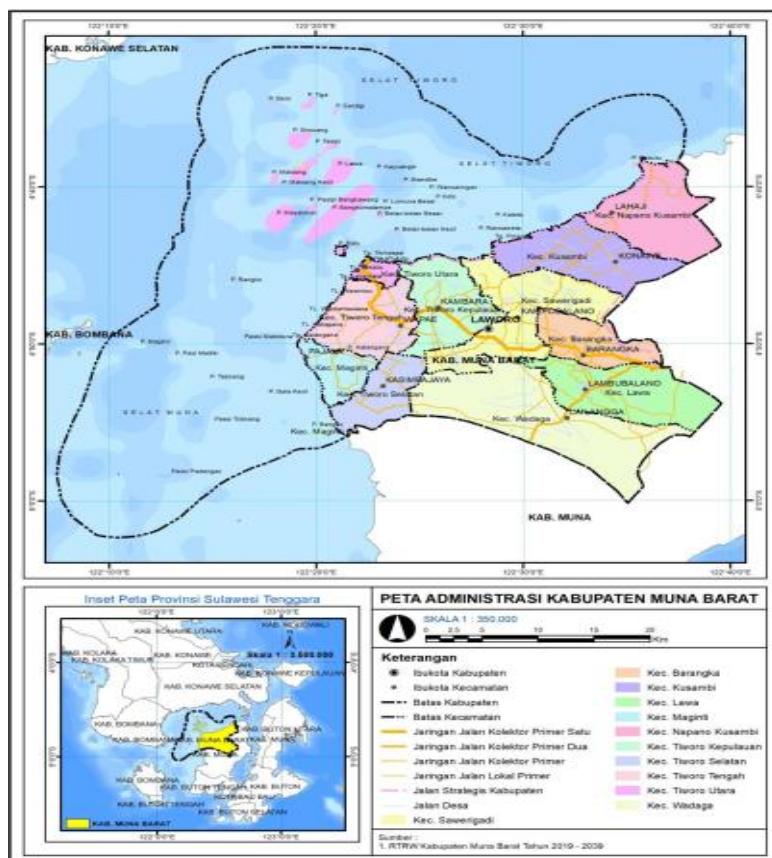
	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Muna Barat	1
Gambar 1.2 Jumlah Umur menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Muna Barat tahun 2023	2
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat 2021-2024....	3
Gambar 1.4 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kab. Muna Barat 2019-2023.....	6
Gambar 3.1 Proses Bisnis Sasaran 1	24
Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup	28
Gambar 3.3 Tingkat Pencapaian SPM Sulawesi Tenggara	30
Gambar 3.4 Tingkat Pencapaian SPM Muna Barat	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom baru yang terbentuk pada tanggal 23 Juli tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 hasil dari pemekaran Kabupaten Muna yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu Kota Kabupaten



Muna Barat berkedudukan di Laworo Kecamatan Sawerigadi merupakan daerah kepulauan yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Muna Barat terletak di Pulau Muna bagian Barat yang memiliki gugusan pulau-pulau kecil, tersebar pada 36 pulau kecil yang terdiri dari 14 pulau berpenghuni tetap, 5 pulau berpenghuni tidak tetap dan 17 pulau tidak berpenghuni. Luas wilayah daratan Kabupaten Muna Barat sebesar 906,28 Km² atau

90.628 ha. Secara administratif Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11 Kecamatan meliputi Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Napanokusambi dan 81 Desa dan 5 Kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Muna Barat berada pada 122°07'26" – 122°39'34"BT dan 04°31'04" – 05°02'17"LS. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2014 Secara geografis, Kabupaten Muna Barat berbatasan dengan:

- Bagian Utara berbatasan dengan Selat Tiworo
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Kontunga, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kontunaga dan Kecamatan Lohia (Desa Liangkobori) Kabupaten Muna.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Komba-Komba, Desa Oensuli, Desa Kabangka Kecamatan Kabangka, Desa Kilambibito, Desa Lemo, Desa ahtara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tiworo

Jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat menurut BPS (Muna Barat Dalam Angka Tahun

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	4.596	4.539	9.135
5–9	4.268	4.135	8.403
10–14	4.197	4.110	8.307
15–19	4.086	3.971	8.057
20–24	4.123	3.838	7.966
25–29	4.082	3.872	7.954
30–34	3.640	3.673	7.313
35–39	3.228	3.251	6.479
40–44	2.734	2.787	5.521
45–49	2.387	2.545	4.932
50–54	2.226	2.365	4.591
55–59	1.806	1.902	3.708
60–64	1.332	1.639	2.971
65–69	1.014	1.247	2.261
70–74	716	945	1.661
75+	712	985	1.697
Jumlah/Total	45.152	45.804	90.956

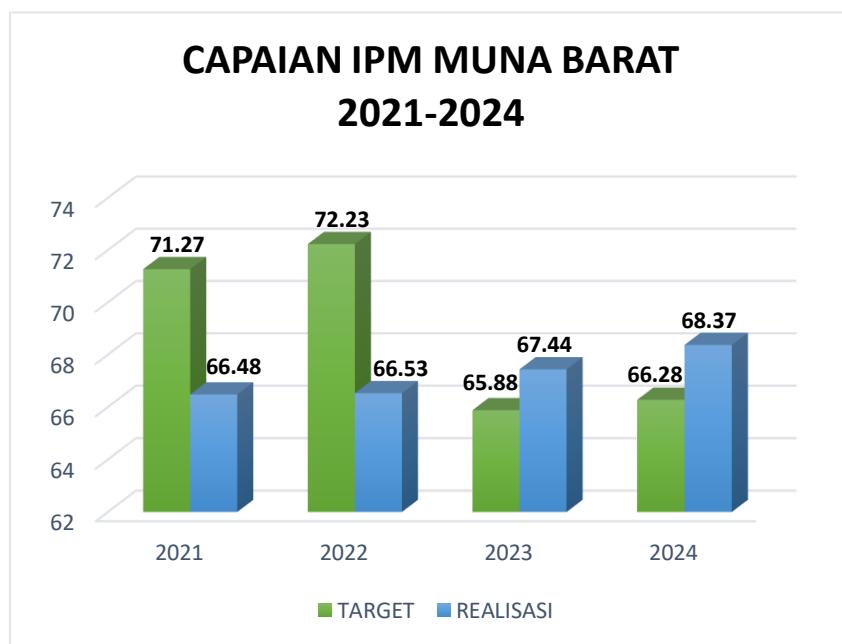
dominasi jumlah penduduk usia muda.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024 adalah 64,17%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kabupaten Muna Barat memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sorang yang belum produktif

2025) untuk tahun 2024 sebanyak 90.956 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 (*Population Growth %*) 1,87 % kepadatan penduduk 93,5/km². Adapun penduduk laki-laki berjumlah 45.125 jiwa (49,65%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 45.804 jiwa (50,35%). Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Muna Barat menurut Jenis Kelamin dan kelompok umur tersebut, berarti memiliki struktur piramida yang berbentuk eksponsif, terdapat

dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2018 hingga 2022, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 64,17%. dengan penurunan rata-rata -0,01% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kabupaten Muna Barat semakin berkurang setiap tahunnya. (data masih diolah)

1.2 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUNA BARAT



Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai

tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Nilai IPM Kabupaten Muna Barat tahun 2024 dengan nilai IPM 68,37, tahun 2023 dengan nilai IPM 66,74 dan tahun 2022 dengan nilai IPM 66,53 merupakan kategori *Sedang*.

1.3 PERTUMBUHAN EKONOMIAN KABUPATEN MUNA BARAT

Perekonomian daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran terjadinya perubahan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Olehnya itu, kebijakan-kebijakan umum dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi tahun berikutnya yang didukung oleh data-data yang akurat dan dapat dipercaya.

Perekonomian di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan empirisnya masih bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muna Barat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan persentase PDRB pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,07 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya ditahun 2023 mencapai 5,46 persen. Penurunan yang signifikan ini, sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya kondisi perekonomian Muna Barat mampu mencapai pertumbuhan sebesar 6,79 persen di tahun 2019, kemudian 6,62 persen pada tahun 2018. Salah satu yang menyebabkan penurunan pertumbuhan PDRB adalah terjadi pada sektor konstruksi yang tahun lalu menyumbang 8,39 untuk pertumbuhan PDRB pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 sebesar -3,92 persen. Rata-rata sektor lapangan usaha di Kabupaten Muna Barat memberikan pertumbuhan yang fluktuatif di tahun 2024, hanya lapangan usaha Industri Pengolahan, administrasi pemerintahan, pertahanan serta jaminan sosial dan jasa lainnya yang mengalami pertumbuhan positif signifikan.

Sementara itu, laju pertumbuhan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Harga Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha dalam 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan serta jaminan sosial dengan persentase kontribusi terhadap PDRB yaitu sebesar 11,58 pada tahun terakhir 2024. Adapun secara detail kontribusi masing-masing sektor perekonomian Daerah Kabupaten Muna Barat terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Harga
Konstan Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2019 – 2023

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	2,50	6,50	4,33	5,04	4,39

B	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	-3,56	0,08	4,92	4,91	0,35
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	-1,99	1,85	2,77	-6,66	7,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0,16	4,75	3,98	5,70	2,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	1,34	2,67	0,45	7,59	5,62
F	Konstruksi / Construction	-0,80	-1,02	5,26	8,36	-3,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-2,02	5,77	4,95	6,39	7,81
H	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	-2,55	5,56	1,80	2,99	-2,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	-0,59	4,04	1,77	8,23	5,39
J	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	7,83	2,13	1,23	4,34	4,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	2,54	3,39	3,56	4,80	2,25

L	Real Estat / Real Estate Activities	0,37	3,05	1,22	3,86	4,52
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	-1,22	5,68	1,90	5,25	6,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,93	9,40	-0,71	7,61	11,58
P	Jasa Pendidikan / Education	1,90	6,10	1,13	7,75	3,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	4,15	6,20	4,09	-4,51	3,68
R,S, T,U	Jasa lainnya / Other Services Activities	-1,70	7,20	1,85	1,87	6,28
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		0,42	3,96	4,08	5,46	3,07

Sumber: Muna Barat Dalam Angka, 2025



Gambar 1.4 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kab. Muna Barat 2020-2024

Berdasarkan grafik perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa terjadi pertumbuhan yang fluktuatif pada persentase perekonomian Daerah Muna Barat. Dalam hal ini, laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat mengalami kontraksi drastis sehingga berada pada persentase 0,42% sebelum kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 5,46% dan menurun kembali di tahun 2024 di angka 3,07. Hal ini terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 diakibatkan banyaknya kegiatan perekonomian di daerah Muna Barat yang turut terdampak akibat pandemi Covid-19. Bahkan, kondisi itu turut berimplikasi pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang terus menurun selama pandemi Covid-19 sehingga turut mempengaruhi kegiatan produksi yang secara akumulasi berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan di tahun 2024 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi karena sektor konstruksi atau pembangunan perkantoran yang dilakukan di tahun 2023 dan berhenti di tahun 2024, sehingga terjadi perbedaan besar dalam sektor ekonomi. Selain itu, perubahan dalam anggaran pemerintah atau prioritas pembangunan dapat secara langsung mempengaruhi aktivitas konstruksi.

Selain itu, akumulasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Muna Barat dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	1.012,63	1.210,29	1.091,28	1.329,28	1430,72
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	263,00	315,82	278,69	359,48	358,55
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	83,34	94,99	88,02	92,75	104,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0,73	0,84	0,77	0,92	0,96

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,46	0,50	0,46	0,54	0,60
F	Konstruksi / Construction	545,41	625,46	588,23	700,777	677,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	257,66	308,82	274,11	344,32	374,72
H	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	36,49	44,24	37,58	50,20	47,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	4,28	4,66	4,36	5,13	5,51
J	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	27,33	28,00	27,31	28,89	30,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	18,39	21,91	19,92	23,36	23,92
L	Real Estat / Real Estate Activities	40,91	45,16	41,96	47,93	50,43
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	0,47	0,54	0,49	0,59	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public	137,23	153,05	138,68	167,22	190,74

	Administration and Defence; Compulsory Social Security					
P	Jasa Pendidikan / Education	124,43	141,35	127,22	158,83	165,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	30,10	34,37	31,73	33,29	34,00
R,S, T,U	Jasa lainnya / Other Services Activities	35,23	40,02	36,30	42,16	44,87
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		2.618,03	2.787,51	3.070,00	3.386,99	3541,18

Sumber: Muna Barat Dalam Angka, 2025

1.4 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

Pemerintah Kabupaten Muna Barat Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama terjadi pemilihan Kepala Daerah defenitif sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2017-2022. Pada bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang Kabupaten Muna Barat di Pimpin Oleh Penjabat Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran di bawahnya

Susunan pemerintahan Kabupaten Muna Barat adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Dinas, Badan, Kantor, serta Sekretariat Kecamatan, dan Desa. Pemerintahan daerah juga berkoordinasi pula dengan kantor kementerian di daerah, Lembaga negara setingkat kementerian di daerah, lembaga pemerintahan non kementerian di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8), Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat terdiri dari 44 OPD/Unit Kerja yakni :

1. Sekretariat Daerah (9 Bagian)
2. Sekretariat Dewan (3 Bagian)
3. Inspektorat Daerah (3 Irban)

4. Dinas (23 OPD)
5. Badan (6 OPD)
6. RSUD
7. Kecamatan (11 Kecamatan)

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memiliki sumber daya manusia yang belum berkecukupan dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah aparatur sipil negara per 1 Februari 2024 mencapai 2.232 orang, yang terdiri dari 1.011 laki-laki (45,29%) dan 1.221 perempuan (54,70%). Apabila dilihat :

- a. Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Muna Barat didominasi oleh jenjang Pendidikan Diploma IV, Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D (1.855 orang), Diploma III/Akta III/Sarjana Muda (227 orang) Diploma I, II/Akta I, II (32 orang) diikuti SMA/Sederajat (146 orang), dan sisanya sebanyak 4 orang mengenyam Pendidikan SD, SMP
- b. Berdasarkan Jabatan jumlah sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tingkat JFT Pratama / Eselon II (38 Orang), Administrator / Eselon III (152 Orang) Pengawas/ Eselon IV (137 Orang) JF Guru (725 Orang), Tenaga Kesehatan (409), sisanya JFU/Pelaksana (852 Orang)

1.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang

Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Muna Barat, diantaranya adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Ruang
3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4. Peningkatan kualitas Pendidikan
5. Peningkatan layanan kesehatan
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

7. Penurunan Angka kemiskinan
8. Peningkatan Daya saing produk unggulan.
9. Peningkatan pengolahan sumberdaya alam (lahan potensial)
10. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
11. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023 – 2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 - 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022, Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Tujuan RPD Kabupaten Muna Barat merujuk pada Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020-2024 dan Sasaran dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, Sasaran dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan arah RTRW Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat 2023-2026, terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	1	Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		3	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman
2	Memantapkan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	4	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
		5	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
3.	Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkedilan	6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan;

		7	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha
4	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
		9	Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan public

2.1.1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2024

Tabel 2.2

Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target
1	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	Indeks pembangunan manusia (IPM)	%	67
2	Memantapkan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Indeks Kemantapan Infrastruktur dan Lingkungan daerah	%	69,50
3.	Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkedilan	PDRB ADHK	Rp. T	2,04
		Indeks Gini	%	0,37
4	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	%	70

Tabel 2.3

Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat	Indeks Pendidikan	%	62

2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	77,49
3	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman	Tingkat pencapaian SPM	%	100
		Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	%	120
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Kemantapan Infrastruktur Daerah	%	69,50
5	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	74,3
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan;	Pertumbuhan PDRB bidang usaha pertanian	%	5 - 7
		Pertumbuhan PDRB bidang usaha non pertanian terkait dengan ekonomi kerakyatan	%	6 - 8
7	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	2,5 – 3,5
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Predikat	CC
9		Opini BPK atas LKD	Predikat	WTP

	Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik	Opini Ombudsman	Predikat	Kuning
--	---	-----------------	----------	--------

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat kegiatan, output, target, dan anggaran Indikator Kinerja sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Muna Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat	Indeks Pendidikan	%	62
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	77,49
3	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman	Tingkat pencapaian SPM	%	100
		Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	%	120
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Kemampuan Infrastruktur Daerah	%	69,50
5	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	74,3

6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan;	Pertumbuhan PDRB bidang usaha pertanian	%	5 - 7
		Pertumbuhan PDRB bidang usaha non pertanian terkait dengan ekonomi kerakyatan	%	6 - 8
7	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)		2,5 – 3,5
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Predikat	CC
9	Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan public	Opini BPK atas LKD Opini Ombudsmen	Predikat	WTP Kuning

2.3. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

Tabel 2.5

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat	146.519.378.789,00	Dinas Pendidikan
		5.090.597.353,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.069.545.868,00	Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	80.671.319.309,00	Dinas Kesehatan
		19.491.028.149,00	RSUD Kab Muna Barat
		7.820.364.465,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.080.996.299,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		2.642.810.809,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	144.516.355.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		6.868.726.781,00	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat
		2.398.866.921,00	Dinas Perhubungan
		3.904.563.939,00	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
		2.626.878.505,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		22.817.107.409,00	Badan Kesbang Pol
		9.509.741.488,00	Dinas Sosial
		4.038.050.724,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.	4.552.695.801,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan;	2.466.917.410,00	Dinas Ketahanan Pangan
		20.201.829.793,00	Dinas Pertanian
		5.313.281.185,00	Dinas Koperasi dan UMKM
		3.262.063.847,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
		2.901.128.116,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		3.058.122.284,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		8.087.181.836,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.	6.237.977.240,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	6.017.151.216,00	BAPPEDA
		6.711.687.000,00	Inspektorat Daerah
		29.005.822.237,00	Sekertariat Daerah
9	Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan public	151.566.419.687,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		2.526.616.109,00	Dinas Pendapatan
		3.614.671.492,00	BKPSDM
		21.592.790.667,00	Sekretariat DPRD
		16.728.476.810,00	Kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilakukan secara berkala dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

3.1. PENGUKURAN KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2024 dilakukan pengukuran dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Muna Barat Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 yang diperbandingkan serta target akhir tahun RPD 2024 tercantum dalam tabel berikut ini :

3.2. ANALISA CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA

3.2.1. Indikator Tujuan

Tabel 3.1.

Tujuan 1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

Indikator Tujuan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Indeks pembangunan manusia (IPM)	Nilai			66,5	67	67,44	68,37
				101,41	102,04		

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial, yang ditentukan oleh 3 aspek yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. IPM dibagi menjadi 4 kategori yakni

- kategori rendah (IPM < 60),
- kategori sedang (60 < IPM < 70),
- kategori tinggi (70 < IPM < 80), dan
- kategori sangat tinggi (IPM > 80).

Kabupaten Muna Barat pada tahun 2023 Nilai IPM sebesar 67,44 dan Tahun 2024 Nilai IPM Mencapai 68,37 Angka IPM ini memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Walaupun Kabupaten Muna Barat Nilai IPM Masih dalam kategori **sedang** dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara yang beberapa telah mencapai kategori **tinggi**, perbandingan IPM tersebut dapat dilihat pada tabel yang tertera dibawah ini

Tabel 3.2.

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten	Tahun		
	2022	2023	2024
Buton	67,23	68,12	69,72
Muna	69,61	70,16	71,50
Konawe	72,04	72,77	74,50
Kolaka	73,98	74,72	76,20
Konawe Selatan	69,36	70,32	71,51
Bombana	66,81	67,43	68,85
Wakatobi	70,85	71,43	72,03
Kolaka Utara	70,39	71,04	71,75
Buton Utara	69,00	69,7	70,75
Konawe Utara	71,10	71,71	72,71
Kolaka Timur	68,73	69,57	70,32

Konawe Kepulauan	66,69	67,32	68,77
Muna Barat	66,21	67,13	68,37
Buton Tengah	65,29	65,83	67,58
Buton Selatan	65,44	66,15	68,04
Kota Kendari	84,51	84,85	85,97
Kota Bau-Bau	76,67	77,52	79,61
Sulawesi Tenggara	72,23	72,79	73,62
Nasional	72,91	74,39	75,02

Sumber Data BPS 2025 (data diolah)

Permasalahan tersebut di karenakan

- 1) Masih rendahnya kualitas daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2021-2024 dapat ditunjukan dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muna Barat dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara atau dengan rata-rata Nasional. IPM Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 berada pada posisi ke 14 dari 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, serta berada dibawah rata-rata Nasional (table 3.2 diatas)
- 2) Rendahnya Daya Saing Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 3) Rendahnya Produksi, Produktifitas, dan Nilai Tambah Perekonomian Daerah
- 4) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam dilihat dari 2 aspek yakni aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aspek kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.3.

Tujuan 2 Indeks Kemantapan Infrastruktur dan Lingkungan daerah

Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
Indeks Kemantapan Infrastruktur dan Lingkungan daerah	Nilai					
			68	69,50	66,27	67,72
					97,46	97,43

Tabel 3.4.
Tujuan 3 Memperkuat ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan

Indikator Tujuan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
PDRB ADHK	(Rp. Juta /T)	1,94	2,04	2,11	2,17	108,76	106,37
<hr/>							
Indikator Tujuan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Gini ratio	Nilai	0,37	0,37	0,31	0,31	119,35	119,35

Sumber data : BPS 2025 (data diolah)

PDRB ADHK/kapita pada tahun 2024 terealisasi 2,17 dari target 2,04 dengan capaian 106,37 juta dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi 2,11 dari target 1,94 dengan tingkat capaian 108,76 juta. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Muna Barat mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, pengeluaran perkapita merupakan salah satu komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Komponen pengeluaran terbagi atas pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan. Dari hasil Susenas 2024 terlihat bahwa total pengeluaran per kapita di Kabupaten Muna Barat meningkat dari Rp.804.673 pada tahun 2023 menjadi Rp.831.271 pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pengeluaran untuk kelompok makanan, yang naik dari Rp.413.228 menjadi Rp468.730, sementara pengeluaran untuk kelompok non–makanan justru mengalami penurunan dari Rp.391.385 menjadi Rp.362.540.

Secara persentase, proporsi pengeluaran untuk makanan naik dari 51,36% pada 2023 menjadi 56,39% pada 2024. Sementara itu, pengeluaran untuk kebutuhan non–makanan turun dari 48,64% menjadi 43,61%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih banyak mengalokasikan dana untuk kebutuhan konsumsi makanan dibandingkan kebutuhan lainnya. Dalam kelompok makanan, beberapa kategori mengalami peningkatan pengeluaran signifikan. Contohnya, konsumsi buah–buahan meningkat drastis dari Rp.18.460 pada 2023 menjadi

Rp.38.963 pada 2024. Begitu juga dengan konsumsi ikan/udang/cumi/kerang yang meningkat dari Rp.53.467 menjadi Rp.62.169. Sementara itu, konsumsi umbi–umbian justru menurun dari Rp.4.224 menjadi Rp.2.993, yang dapat mengindikasikan pergeseran pola konsumsi masyarakat dari tradisional seperti singkong dan ubi ke sumber lain seperti beras atau makanan olahan.

Mendasarkan hasil proyeksi Bappeda dengan mempertimbangkan trend angka gini rasio pada tahun sebelumnya, serta penurunan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, realisasi Gini rasio pada tahun 2024 sebesar 0,31. Nilai ini lebih baik dibandingkan target sebesar 0,37 poin. Jika melihat gini rasio Sulawesi Tenggara dan Nasional, gini rasio Kabupaten Muna Barat lebih rendah dibanding Sulawesi Tenggara dan lebih tinggi dibandingkan nasional. Hal ini tentu menjadi catatan dalam menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga kesenjangan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi tidak semakin lebar.

Tabel 3.5.

Tujuan 4 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan

Indikator Tujuan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	70	55,29	65,06	85,06	92,94

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB tahun 2023 dan tahun 2024 (data di Olah)

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024 sebesar 65,05 dengan nilai capaian 92,94, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 85,06, sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,88 poin

3.2.2. Indikator Sasaran

Tabel 3.6.
Indikator Sasaran 1.

Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat

Sasaran 1						
Indikator kinerja	Target		Realisasi		Rasio Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Indeks Pendidikan	61	62	62,54	62,36	102,5	100,58
Angka rata-rata lama sekolah	7,55	7,80	7,86	8,09	104,1	103,71
Angka harapan lama sekolah	12,53	12,54	12,62	12,74	100,7	101,59
Angka Melek Huruf	91,67	92,27	99,83	95,46	108,9	103,45

Definisi	- indeks pendidikan diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah dengan perkiraan lama sekolah
Formulasi	<p style="text-align: center;">Keterangan :</p> $IPendidikan = \frac{IALS + IRLS}{2}$ <p>Ipendidikan = Indeks Pendidikan IALS = Indeks Angka Lama Sekolah IRLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah</p>

Sumber: Data BPS 2025 (data diolah)

Analisa Hasil Pengukuran

Untuk mengukur Indeks Pendidikan menggunakan dua komponen yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan anak berusia 15 tahun keatas yang menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM (BPS, 2010).

Berdasarkan tabel 3.6. diatas, **Indeks Pendidikan pada tahun 2023 dengan target sebesar 61 capain kinerja sebesar 62,54 dan nilai capaian 102,5, pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Muna Barat Menargetkan Indeks Pendidikan sebesar 62,00 dengan realisasi kinerja sebesar 62,36 sehingga capaiannya berada di angka 100,58** dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2023 – 2024 telah memenuhi target, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan capaian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Sekolah yang masih belum memadai
2. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat belum terakses secara merata
3. Keterbatasan Penggunaan Akses Teknologi Digital
4. Pemerataan Guru sesuai keahlian belum terdistribusi dengan baik
5. Kondisi Geografi, masih banyak wilayah kepulauan yang susah di akses
6. Jarak Antara Sekolah dengan Permukiman
7. Kemampuan anak yang rendah didukung rendahnya motivasi orang tua terhadap pendidikan bahwa pendidikan bukan merupakan kebutuhan pokok dan mendesak.

Untuk mencapai Keberhasilan kinerja didukung beberapa kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat, dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kab. Muna Barat
2. Penyusunan program pendidikan secara terpadu yang juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan,
3. Dalam penyelenggaraan pendidikan mengacu pada prinsip “Pendidikan murah” dan “Pendidikan Gratis” untuk masyarakat miskin.
4. Pembelajaran dalam pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan atau mengintensifkan kegiatan pemberantasan buta aksara atau kesetaraan fungsional, untuk memberantas tuntas masyarakat buta huruf.
6. Mengoptimalkan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun.
7. Peningkatan kemampuan, keahlian dan kualitas tenaga pengajar (guru) dalam proses belajar mengajar terutama untuk tingkat sekolah dasar, sehingga dapat mempengaruhi terhadap kualitas siswa.

Keberhasilan pembangunan Pendidikan sangat membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan, baik pemerintah maupun non pemerintah, sejak langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasinya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pencapaian target indeks pendidikan, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan harus memiliki komitmen untuk dapat tercapainya harapan tersebut.

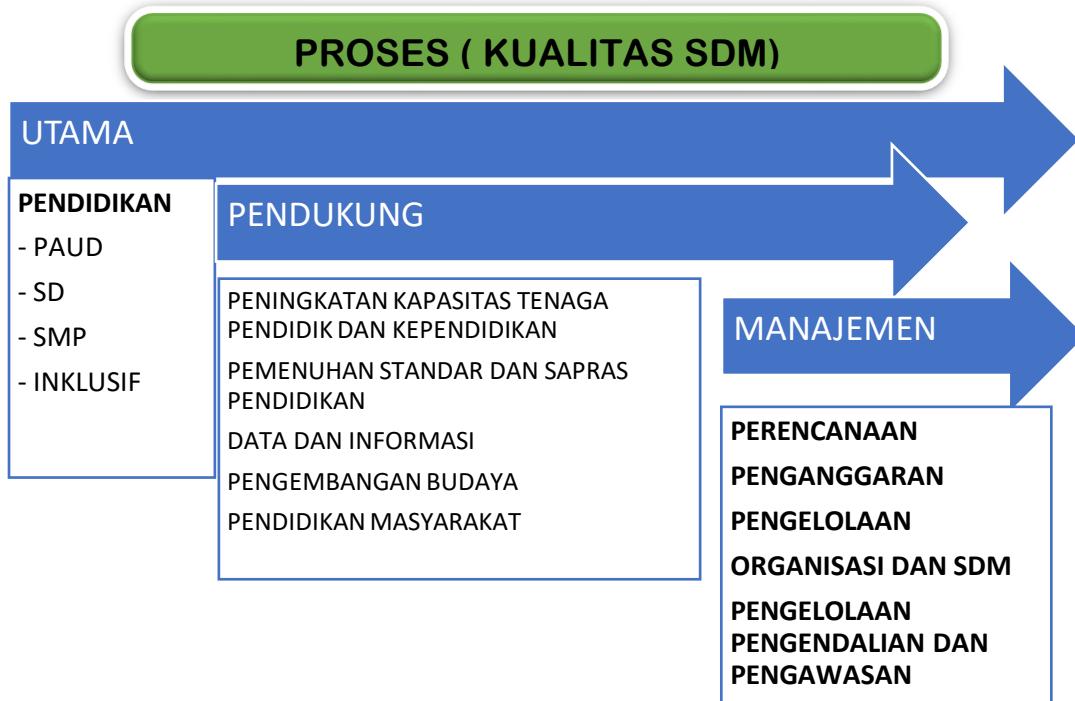
Framework Kebijakan

Sasaran peningkatan kualitas pendidikan memiliki skema intervensi yang sangat komprehensif. Sebagaimana ditunjukkan dalam proses bisnis dibawah ini, selain aspek manajemen, total terdapat aspek yang memiliki kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Empat diantaranya yang paling utama adalah pendidikan (1) SD, (2) SMP, (3) Anak Usia Dini dan (4) Inklusi. 5 aspek lainnya yang tidak kalah penting namun memiliki peran pendukung adalah (1) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, (2) pemenuhan standar dan sarana prasarana pendidikan, (3) penguatan data dan informasi, (4) pengembangan budaya literasi, dan (5) pendidikan masyarakat dan pembinaan lembaga pendidikan keterampilan

Gambar 3.1

Proses Bisnis Sasaran 1

Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat



Skema sebagaimana digambarkan dalam proses bisnis diatas mensyaratkan keterlibatan beberapa OPD yang memiliki ketugasan terkait. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan mengambil peran paling pokok, memasuki hampir semua aspek, baik utama maupun pendukung. Beberapa OPD lain yang ikut berkontribusi dalam aspek utama adalah Dispora (Pendidikan SMP), Kecamatan (TK/PAUD), dan DPPPA (Pendidikan Inklusi). Aspek pendukung untuk pemenuhan sarpras dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penguatan data dan informasi oleh Dinas Sosial, pengembangan budaya literasi oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kecamatan. Dan digambarkan pada *logframe* sasaran 7 berikut.

Dinas Pendidikan memiliki beragam intervensi pada masing-masing aspek. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran, pengelolaan prestasi siswa, pengelolaan BOS dan BOSDA, serta jaminan pendidikan daerah memperkuat aspek pendidikan, baik SD maupun SMP. Intervensi yang direncanakan untuk SD meliputi pendalaman dan tes pendalaman materi ujian, pendampingan penyusunan kurikulum, Bimtek penyusunan soal ujian dan pembelajaran matematika dan IPA, pembinaan melalui klinik sains, dan fasilitasi partisipasi dalam berbagai kejuaraan, Sedangkan intervensi untuk SMP hampir sama dengan SD, ditambah pelaksanaan pendidikan Agama berbasis afeksi, pengembangan minat bakat, olimpiade literasi, dan sekolah sehat.

Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung aspek pendidikan SMP melalui fasilitasi tri lomba juang, pelatihan 6 cabang olahraga, seleksi dan pengiriman POPDA, serta seleksi dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMP. aspek utama lainnya, TK/PAUD dan Pendidikan Inklusi diampu Dinas Pendidikan dengan masing-masing mendapat dukungan dari Kecamatan

Dinas Pendidikan memiliki skema pengelolaan TK/PAUD yang meliputi pembinaan layanan, pendataan, dukungan operasional, pemberian insentif pendidik, gebyar TK/PAUD, pengadaan sarpras dan rehab sekolah, serta berbagai skema peningkatan SDM: workshop, peningkatan kompetensi, pelatihan pembelajaran media, uji kompetensi, dan bimtek kompetensi pedagogi, dalam hal pengelolaan TK/PAUD, dukungan Kecamatan juga menyasar pembinaan TK/PAUD di masing-masing kelurahan/Desa.

Sementara itu, aspek pendidikan inklusi menekankan pada siswa (*assesmen* dan diklat vokasi siswa lambat), guru (workshop kurikulum ABK dan pemberian insentif guru pendamping khusus), sekolah (workshop pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan pengadaan sarana prasarana). Melalui aspek peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan merencanakan pengembangan kompetensi Guru, pelatihan karya tulis ilmiah, administrasi sekolah dan pendidikan inklusi untuk guru/ GPK, PPG dalam jabatan, pembinaan pegawai/ guru, pendampingan pengusulan angka kredit, penilaian kinerja kepala sekolah, dan induksi guru. Aspek pemenuhan standar dan sarpras pendidikan ditempuh melalui workshop manajemen SD dan SMP, penguatan manajemen SMP, pendampingan akreditasi, pelaksanaan evaluasi diri SMP, verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah, rehab ringan gedung SD, pengadaan meja, kursi, almari dan sarpras lainnya, dan fasilitasi lomba gugus depan

unggu SD. Upaya pemenuhan sarpras tersebut didukung Dinas Pekerjaan Umum dengan Pembangunan dan rehab sekolah dan penyusunan DED Sekolah SD dan SMP

Intervensi terkait penguatan data dan informasi meliputi pelaksanaaan KBS online, rangkuman data pendidikan, pengelolaan Dapodik dan informasi pendidikan, fasilitasi penyelenggaraan PPDB online, serta pengembangan dan pengelolaan aplikasi. Sementara itu, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendukung aspek ini melalui verifikasi lapangan data siswa yang membutuhkan jaminan pendidikan daerah namun belum teridentifikasi sebagai sasaran.

Untuk pendidikan masyarakat dan pembinaan LPK, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan ketrampilan dengan pendaftaran akreditasi Lembaga PNF, bintek akreditasi lembaga kursus dan uji kompetensi instruktur kursus, pendidikan vokasional, serta lomba lembaga kursus berprestasi. Sementara itu, Dinas Pariwisata mendukungnya melalui layanan di Taman Pintar, wisata alam dan kecamatan melalui fasilitasi lembaga kemasyarakatan di tiap kelurahan dan desa.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

Terkait pencapaian sasaran dimana pendidikan menjadi inti intervensi, setidaknya menyebabkan Adanya kebijakan *refocusing* anggaran menyebabkan beberapa aktivitas yang dirasa kurang urgent tidak dilaksanakan, namun beberapa aktivitas lain yang bersentuhan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan pandemi yang tidak direncanakan sebelumnya harus dilaksanakan. Dari pelaksanaan intervensi sepanjang tahun 2023 sebagaimana dijelaskan, setidaknya terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dilapangan. Salah satunya terkait upaya identifikasi anak putus sekolah. Data tersedia yang dimiliki adalah data siswa yang terdata di DAPODIK dan EMIS masing-masing sekolah. Untuk mengidentifikasi jumlah anak putus sekolah, data tersebut di-overlay dengan data kependudukan dari Dindukcapil. Untuk lebih mengkerucutkan prioritas penanganan, overlay juga dilakukan dengan basis data masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah digunakan. Disini diasumsikan bahwa persoalan putus sekolah secara umum disebabkan problem ekonomi keluarga, sehingga kelompok yang berpotensi putus sekolah adalah kelompok miskin atau tingkat kesejahteraan rendah. Ada dua basis data terkait, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, dan Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Sebagai langkah antisipasi sementara, Dinas Pendidikan memanfaatkan jaringan diwilayah yang dimiliki. Skema Jam belajar Masyarakat (JBM) yang memiliki basis aktivitas tiap Desa yang masing-masing terdiri dari satu tim merupakan potensi yang bisa digali. Penanganan putus sekolah sementara di tahun 2024 ini adalah dengan membuka kanal pengaduan dari tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat. Disamping itu, upaya penanganan juga perlu dirumuskan secara komprehensif. Hal ini terutama untuk mengantisipasi jika alasan

putus sekolah bukan beban finansial. Beberapa kemungkinan alasan yang lain termasuk keterbatasan fisik, psikomotorik dan mental (difabel), psikologis (misalkan korban *bullying* atau *broken home*) serta hukum. Untuk alasan-alasan tersebut, alokasi anggaran dalam bentuk jaminan Pendidikan daerah tentu tidak akan secara efektif menyelesaikan masalah. Alternatifnya, perlu adanya tim kolaboratif lintas sektor untuk bisa mengidentifikasi sasaran dan permasalahan, serta menangani secara komprehensif dan berkesinambungan

Tabel 3.7

Indikator Sasaran 2.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator kinerja	Target		Realisasi		Capain	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Indeks Kesehatan	77,48	77,49	70,46	78,82	90,94	101,71
Definisi	Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.					
Formulasi			$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$			
	AHH		= Angka Harapan Hidup			
	AHHmin		= Angka Harapan Hidup Minimum			
	AHHmax		= Angka Harapan Hidup Maksimal			

Sumber Data BPS 2025 (data diolah)

Analisa Hasil Pengukuran

Dalam data BPS 2025 angka harapan hidup dalam wilayah Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggaran dan Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

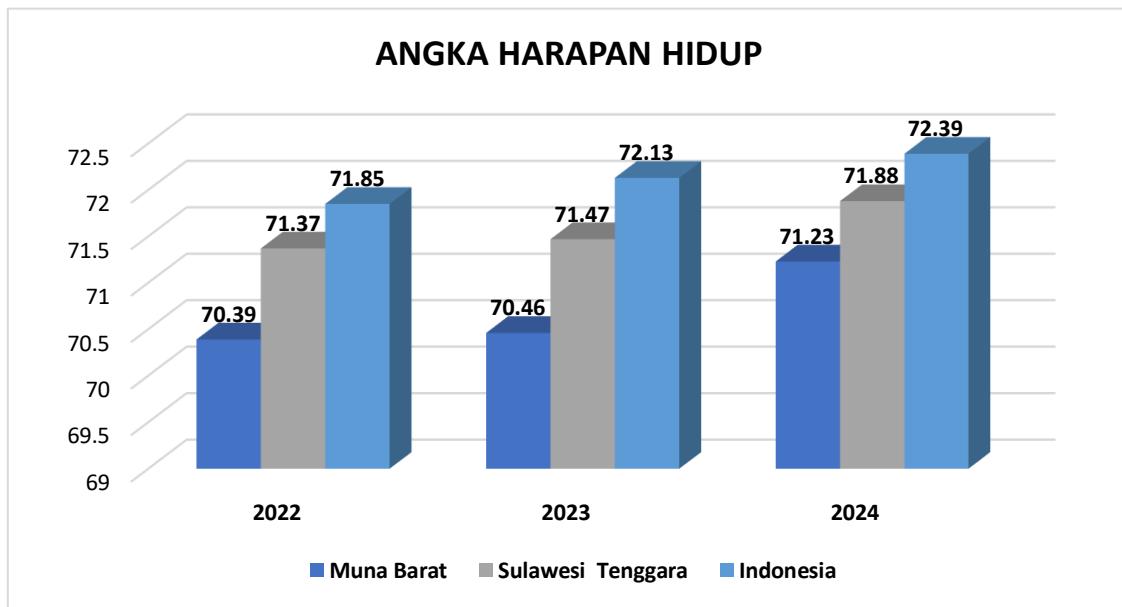
Tabel 3.8

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Kab/Prov/Nasional	2022	2023	2024
Muna Barat	70,39	70,46	71,23
Sulawesi Tenggara	71,37	71,47	71,88
Indonesia	71,85	72,13	72,39

Sumber : Data BPS 2025

Gambar 3.2. Angka Harapan Hidup



Untuk harapan hidup kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2023 adalah 70,46 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Muna Bara mempunyai harapan hidup di dunia hingga berumur \pm 70 tahun dan Untuk harapan hidup kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2024 adalah 71,23 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Muna Barat mempunyai harapan hidup di dunia hingga berumur \pm 71 tahun.

Untuk harapan hidup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2022 adalah 71,37 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai harapan hidup di dunia hingga berumur \pm 71 tahun dan Untuk harapan hidup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2024 adalah 71,88 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai harapan hidup di dunia hingga berumur \pm 71 tahun.

Demikian pula untuk penduduk di Indonesia Pada Tahun 2022 adalah 71,85 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir mempunyai harapan hidup di dunia hingga berumur \pm 71 tahun dan Untuk harapan hidup penduduk di Indonesia Tahun 2024 adalah 72,13 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Muna Barat mempunyai harapan hidup di dunia hingga berumur \pm 72 tahun.

Tabel 3.9
Indikator Sasaran 2.

Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
atas pangan, papan dan rasa aman

Sasaran 3							
Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman							
Indikator kinerja	Satuan	Target		Realisasi %		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tingkat pencapaian SPM	Nilai	100	100	73,5	88,07	73,5	88,07
Angka Kriminalitas	Nilai	130	120	62,40	84	48	84
Definisi	Tingkat pencapaian SPM						
	Jumlah Jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Meliputi : (1). Pendidikan (2). Kesehatan (3). Perumahan Rakyat (4). Pekerjaan Umum (5). Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (6). Sosial						
	Angka Kriminalitas						
Formulasi	Angka Kriminalitas atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 10.000						
	Tingkat pencapaian SPM						
	Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar						
	Angka Kriminalitas						
$\frac{\text{Jumlah Tindikan Kriminal ditangani 1 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$							

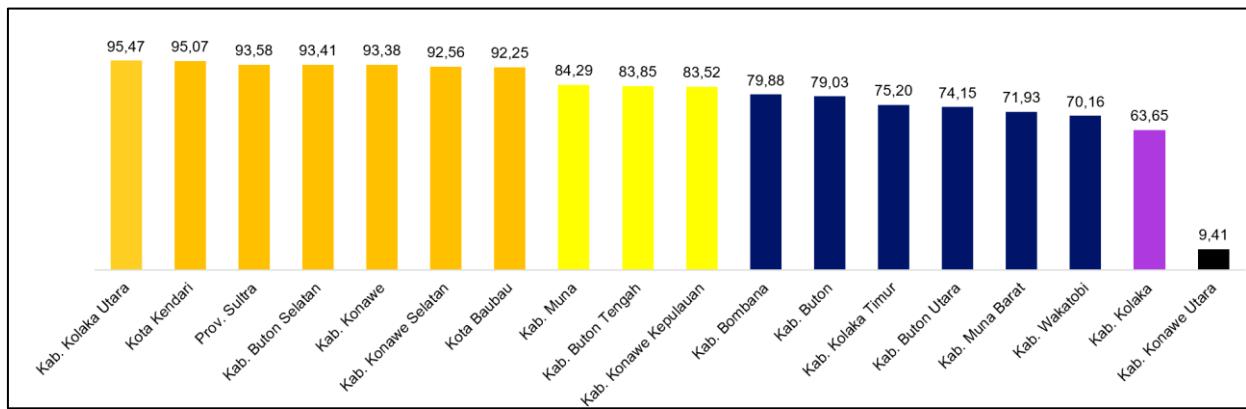
Sumber Data : - BPS 2024 (data diolah)

- : - Permen No 10 Tahun 2010 lampiran 1
- : - spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi (2024)

Analisa Hasil Pengukuran

Gambar 3.3

Tingkat pencapaian SPM Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara 2024



Gambar 3.4

Tingkat pencapaian SPM Kabupaten Muna Barat



Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima. Sasaran 12 Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dengan indicator Rata-rata capaian SPM pelayanan dasar Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan data diatas menunjukan Persentase capaian SPM pada Kabupaten Muna Barat secara Nasional dengan nilai 88,07% pada tahun 2024 rincian capaian SPM diantaranya yaitu Pelayanan Pendidikan 88,96% Pelayanan Kesehatan 61,55%, Pekerjaan Umum 100% Perumahan Rakyat 100% Trantibunlimas 97,15 dan Sosial 80,74 pada Triwulan IV.

Angka Kriminalitas

Berdasarkan evaluasi situasi kamtibmas, Kepolisian Resor (Polres) Muna mencatat sedikitnya ada 506 kasus yang dilaporkan dan 240 kasus yang ditangani. Turun sekitar 204 kasus atau 54% dari tahun 2023. Dari 506 kasus yang ditangani itu, sudah 240 kasus yang sudah terselesaikan. Sisanya, dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Kasus tertinggi didominasi penganiayaan 209 kasus, penggeroyakan 68 kasus, KDRT 39 kasus dan kekerasan terhadap anak 32 kasus. Di lain sisi, ada kasus yang menonjol, yakni pembunuhan, pencabulan dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminal seperti pencurian dan penganiayaan masih menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian. Kejadian ini tersebar di berbagai kecamatan dan dapat berdampak terhadap rasa aman.

Tabel 3.10

Indikator Sasaran 4.

Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 4

Meningkatnya kualitas infrastruktur

Indikator kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Indeks Kemampuan Infrastruktur dan Lingkungan daerah	Nilai	68	69,50	66,22	67,72	97,38	97,43
Formulasi		$IKI = 0,25 JB + 0,15IB + 0,15GB + 0,15SD + 0,15DB + 0,15KT$					

Sumber Data : Bappeda (Data di Olah)

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang menghendaki adanya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan pendekatan Indonesia sentris menjadi menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan strategi tahun 2020-2024 Kabupaten Muna Barat dalam mengembangkan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 harus menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi (RENJA-KL, RKA-KL, dan LAKIP) masing-masing unit kerja secara berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II sampai dengan Unit Kerja terkecil.

Terkait dengan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah, secara tradisional infrastruktur direncanakan, dibangun, dioperasikan, dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintah. Persepsi ini didorong oleh konsep bahwa infrastruktur merupakan barang publik (public goods), yaitu adanya konsumsi oleh pihak lain tanpa mengurangi konsumsi pihak lainnya, serta semua orang mempunyai akses dan hak yang sama untuk menggunakan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin pengadaannya dalam tugasnya melancarkan perekonomian negara, mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk, memudahkan pergerakan, serta memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan rakyat. Sebuah contoh sederhana, pemerintah membangun barang publik berupa jaringan jalan, irigasi pertanian, fasilitas air bersih, sanitasi perkotaan maupun perdesaan. Dalam hal ini pemerintah melakukan tugasnya untuk menentukan alokasi sumber daya agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan karakteristik seperti ini, secara alamiah penyelenggaraan infrastruktur “dimonolopi” oleh sektor publik

Secara alamiah masing-masing wilayah memiliki karakteristik geografis yang berbeda dan bersifat unik, hal ini dipengaruhi terutama oleh kondisi geografis dan aspek fisik setiap wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan wilayah perlu mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah dengan cara mengkaji karakteristik suatu wilayah. Konsep pembangunan yang dianut selama ini adalah konsep pembangunan yang sasaran-sasarananya dikelompokkan mengikuti jenis-jenis sektor yang telah ditentukan. Pendekatan sektoral ini telah melahirkan kemajuan-kemajuan yang bersifat semu. Hal ini terlihat dengan selalumeningkatnya keberhasilan mencapai sasaran pembangunan nasional secara signifikan, namun secara riil kurang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Pembangunan baik nasional maupun **regional yang selama ini memakai pendekatan sektoral pada hakikatnya lebih menekankan pada pertimbangan- pertimbangan berdasarkan karakteristik fisik wilayah. Pertimbangan sosial, budaya demografi dan aspek non fisik lainnya lebih bersifat sebagai pertimbangan penunjang.**

Tabel 3.11
Indikator Sasaran 5
Peningkatan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran 5 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam					
Indikator kinerja		Formula	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Nilai	74,30	76,92	103,53

Selama dua tahun berturut-turut, nilai IKLH cenderung naik. Hal ini wajar karena faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran badan air dan pencemaran udara yang terus meningkat dan terus berkurangnya tutupan vegetasi karena pembangunan atau alih fungsi lahan. Akan tetapi, untuk tahun 2024 ini nilai IKLH justru meningkat. Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil

Capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 103,53% dengan kategori **Tinggi**. Hasil pengukuran kinerja sasaran “Kualitas lingkungan hidup meningkat” dan persentase Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.12
Hasil pengukuran kinerja sasaran “Kualitas lingkungan hidup”

TAHUN	TARGET RPJMD	HASIL			REALISASI			IKLH	CAPAIAN RPJMD	Ket
		IKA	IKU	IKTL	IKA (30%)	IKU (30%)	IKL (40%)			
2017	92.00	68.00	95.50	0.00	20.40	28.65	n.a	49.05	53.32	
2018	94.00	63.03	95.58	0.00	18.91	28.67	n.a	47.58	50.62	Permen LHK No 05 Tahun 2014
2019	94.00	68.08	95.88	0.00	20.42	28.76	n.a	49.19	52.33	
2020	94.25	68.11	95.85	40.56	20.43	28.76	16.22	65.41	69.40	
Tahun	TARGET RPD	IKA	IKU	IKTL	IKA (0,376)	IKU (0,405)	IKL (0,219)	CAPAIAN RPD		
2021	94.50	68.15	90.03	42.43	25.62	36.46	9.29	71.38	75.53	Permen LHK No 27 Tahun 2021
2023	94.75	80.79	95.59	42.43	30.38	38.71	9.29	78.38	82.73	
2024	74.00	58.57	95.71	42.9	22.02	38.76	9.40	70.18	94.84	

Sumber Data (Dinas Lingkungan Hidup) data di olah tahun 2024

Perhitungan IKLH berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Muna Barat pada tahun 2021-2024.

Tabel 3.13
Indikator Sasaran 6

Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan

Sasaran 6				
Indikator kinerja		Tahun		
		2022	2023	2024
PDRB ADHK Sektor Pertanian (M Rp)		3070.00	3386.99	3541.18
Kontribusi PDRB Bidang Pertanian (M Rp)		1210.75	1329.28	1430.72
Realisasi (%)		6,49	5,02	4,39
Target (%)		4 - 6	5 - 7	5 - 7
Capaian %		108,3	100,8	87,8
PDRB ADHK Non Pertanian (M Rp)		2789.15	3052.01	3386.89
Kontribusi PDRB bidang usaha non pertanian terkait dengan ekonomi kerakyatan (M Rp)		492,22	532,76	576,78
Realisasi %		2,51	4,19	4,28
Target %		10	10	6 - 8
Capaian %		25,1	41,9	71,33

Sumber Data : - BPS 2025 (data diolah)

: - Permen No 10 Tahun 2010 lampiran 1

dari tabel 3.13. terlihat Pertumbuhan PDRB bidang usaha pertanian tahun 2024 terealisasi Rp. 3541.81 (dalam Miliaran Rupiah) atau sekitar 4,39% dengan target kinerja 5 - 7 dengan nilai ketercapaian 87,8%

dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi Rp 3386,99 (dalam Miliaran Rupiah) atau 5,02% dari target kinerja 5-7 dengan nilai ketercapaian 100,8 % atau tingkat pertumbuhan PDRB usaha pertanian mengalami penurunan artinya ada faktor atau sektor yang mempengaruhi penurunan pertumbuhan PDRB bidang usaha pertanian yang menggambarkan sebagai ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.

Pertumbuhan PDRB sektor unggulan pada tahun 2024 terrealisasi 4,18 dari target 6-8 dengan nilai capaian 71,33% dibandingkan tahun sebelumnya yang artinya pertumbuhan PDRB sector unggulan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di bidang non pertanian.

Hal ini di dominasi Sektor usaha unggulan di luar usaha pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Muna Barat. Hal ini tercermin dari besarnya persentase pekerja. Lapangan pekerjaan utama penduduk suatu daerah mencerminkan tradisional atau tidaknya struktur ekonomi suatu daerah. Semakin dominan sektor pertanian sebagai sektor primer terhadap sektor lainnya, semakin tradisional struktur ekonomi daerah tersebut Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (mencakup pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 3.14
Indikator Sasaran 7
Berkembangnya Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha

Sasaran 7			
Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha			
	Indikator kinerja	Tahun	
Tingkat Pengangguran Terbuka		2022	2023
Bekerja		47,972	47,770
Pengangguran		1,152	1,062
Realisasi (TPT%)		2,40	2,22
Definisi	Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran Penganggur terbuka Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mendapatkan pekerjaan		991
Formulasi	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$		

Sumber Data : - BPS 2024 (data diolah)
- Permen No 10 Tahun 2010 lampiran 1

Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut mereka tidak biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Menurunnya tingkat kesempatan kerja juga berdampak pada Tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,40 persen di tahun 2022, menurun menjadi 2,22 persen di tahun 2023, pada tahun 2024 capaian Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 2,06. Hal ini berarti setiap 100 angkatan kerja, rata-rata 2-3 orang diantaranya belum bekerja atau belum terserap dalam pasar kerja. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran juga bisa dibaca sebagai ketidakstabilan perekonomian suatu wilayah. Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun disebabkan oleh jumlah orang yang bekerja juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mencapai 47,972 juta jiwa. Ditahun 2023 angkatan kerja yang bekerja menurun menjadi 47,770 juta. Jumlah ini pun mengalami penurunan menjadi 47.225 juta jiwa pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya sektor lapangan pekerjaan yang belum tersedia di Kabupaten Muna Barat dan banyaknya tenaga kerja yang memilih untuk merantau ke luar daerah untuk bekerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2024, ada tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Tiga lapangan kerja tersebut, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan konstruksi. Pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja menjadi pilar utama agar masyarakat tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Tabel 3.15
Indikator Sasaran 8
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah

Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Nilai SAKIP PEMKAB	2023	C	CC
		50	56,25
	2024	C	B
		55	60,14

Sumber data : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemempinan RI

Tabel 3.16
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	18,65	20,39
Pengukuran Kinerja	30	15,59	16,79
Pelaporan Kinerja	15	9,53	9,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,48	13,11
Nilai Hasil Evaluasi	100	56,25	60,14
Tingkat Akuntabilitas		CC	B

Sumber data : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemempinan RI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2024, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat menunjukkan nilai 60,14 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada level Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perangkat Daerah (PD) oleh inspektorat;
- b. Telah menyempurnakan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) mengikuti format yang berlaku;
- c. Masing-masing PD telah menyusun dokumen Rencana Aksi;
- d. Dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Resntra), Perjanjian Kinerja (PK), dan IKU milik PD

Framework Kebijakan

Untuk meningkatkan kapasitas tatakelola pemerintahan, disusunlah proses bisnis sebagai upaya untuk mencapai sasaran. Dengan mengacu pada proses ini, berujung pada penyusunan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Tabel 3.17
Indikator Sasaran 9
Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan publik

Sasaran	Tahun	Target	Realiasi	KET
Opini BPK atas LKD	2023	WTP	WTP	Hasil Penilaian BPK Tahun 2023
	2024	WTP	WTP**	** Dalam Pemeriksaan
Opini Ombudsmen	2023	C	B	
		69,27	81,84	
	2024	C	A	
		69,27	93,46	

Sumber Data : - Hasil Penilaian BPK Tahun 2024

- Hasil Penilaian Ombudsmen Tahun 2023 -2024

Penghargaan ‘Rapor Hijau’ diberikan kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan tingkat

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Guali	20.62	31.85	21.33	21.54	95.34
2	Puskesmas Wuna	19.60	32.37	21.33	21.54	94.84
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.06	31.85	21.33	21.54	94.78
4	Dinas Pendidikan	19.70	31.03	21.15	21.01	92.89
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.92	31.03	20.96	19.60	91.51
6	Dinas Sosial	18.46	31.54	20.92	20.48	91.40
Nilai Akhir dan Zona		93.46				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

kepatuhan yang tinggi dalam pelayanan publik. Ini mencakup aspek-aspek seperti efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Ombudsman RI secara rutin melakukan penilaian dan pengawasan terhadap instansi pemerintah di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Muna Barat berhasil mencetak sejarah dengan meraih penilaian positif dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Penilaian ini dilaksanakan secara berkala oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dengan skor mengesankan sebesar 93,46, Muna Barat tidak hanya memenuhi standar tinggi dalam kepatuhan pelayanan publik tetapi juga berhasil masuk dalam Kategori A atau Rapor Hijau. Prestasi ini semakin istimewa mengingat Muna Barat merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih predikat ini.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Pagu Anggaran	TRIWULAN				REALISASI				Jumlah	Capaian	Penanggung Jawab			
			RENCANA AKSI				Realisasi Serapan Anggaran									
			I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan/ pengetahuan masyarakat	146.519.378.789	36.629.844.697	43.955.813.637	58.607.751.516	7.325.968.939	36.313.790.693	43.576.548.831	58.102.065.108	7.262.758.139	145.255.162.770	99,14	Dinas Pendidikan			
		5.090.597.353	1.272.649.338	1.527.179.206	2.036.238.941	254.529.868	1.267.927.663	1.521.513.195	2.028.684.260	253.585.533	5.071.710.650	99,63	Dinas Pemuda dan Olahraga			
		1.069.545.868	267.386.467	320.863.760	427.818.347	53.477.293	267.109.774	320.531.728	427.375.638	53.421.955	1.068.439.094	99,90	Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan			
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	80.671.319.309	20.167.829.827	24.201.395.793	32.268.527.724	4.033.565.965	19.342.383.667	23.210.860.401	30.947.813.868	3.868.476.733	77.369.534.669	95,91	Dinas Kesehatan			
		19.491.028.149	4.872.757.037	5.847.308.445	7.796.411.260	974.551.407	4.825.644.401	5.790.773.281	7.721.031.042	965.128.880	19.302.577.604	99,03	RSUD Kab Muna Barat			
		7.820.364.465	1.955.091.116	2.346.109.340	3.128.145.786	391.018.223	2.210.265.298	2.652.318.357	3.536.424.476	442.053.060	8.841.061.190	113,05	Dinas Pengendalian Pendudukan			
		2.080.996.299	520.249.075	624.298.890	832.398.520	104.049.815	482.193.807	578.632.568	771.510.091	96.438.761	1.928.775.228	92,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan			
		2.642.810.809	660.702.702	792.843.243	1.057.124.324	132.140.540	686.764.659	824.117.590	1.098.823.454	137.352.932	2.747.058.634	103,94	Dinas Catatan Sipil			
3		144.516.355.250	36.129.088.813	43.354.906.575	57.806.542.100	7.225.817.763	31.376.180.133	37.651.416.159	50.201.888.212	6.275.236.027	125.504.720.531	86,84	Dinas Pekerjaan Umum			

No	Sasaran	Pagu Anggaran	TRIWULAN				REALISASI				Jumlah	Capaian	Penanggung Jawab			
			RENCANA AKSI				Realisasi Serapan Anggaran									
			I	II	III	IV	I	II	III	IV						
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	6.868.726.781	1.717.181.695	2.060.618.034	2.747.490.712	343.436.339	1.688.654.967	2.026.385.960	2.701.847.947	337.730.993	6.754.619.868	98,34	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat			
		2.398.866.921	599.716.730	719.660.076	959.546.768	119.943.346	584.057.086	700.868.503	934.491.337	116.811.417	2.336.228.343	97,39	Dinas Perhubungan			
		3.904.563.939	976.140.985	1.171.369.182	1.561.825.576	195.228.197	967.238.796	1.160.686.555	1.547.582.073	193.447.759	3.868.955.183	99,09	Dinas Infokom			
4	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman	5.309.150.939	1.327.287.735	1.592.745.282	2.123.660.376	265.457.547	1.325.099.424	1.590.119.309	2.120.159.079	265.019.885	5.300.397.697	99,84	Satuan Polisi Pamong Praja			
		2.626.878.505	656.719.626	788.063.552	1.050.751.402	131.343.925	581.252.342	697.502.810	930.003.746	116.250.468	2.325.009.366	88,51	Badan Bencana Daerah			
		22.817.107.409	5.704.276.852	6.845.132.223	9.126.842.964	1.140.855.370	5.700.980.487	6.841.176.584	9.121.568.779	1.140.196.097	22.803.921.948	99,94	Kesbang Pol			
		9.509.741.488	2.377.435.372	2.852.922.446	3.803.896.595	475.487.074	2.353.965.784	2.824.758.941	3.766.345.255	470.793.157	9.415.863.137	99,01	Dinas Sosial			
		4.038.050.724	1.009.512.681	1.211.415.217	1.615.220.290	201.902.536	988.353.583	1.186.024.300	1.581.365.733	197.670.717	3.953.414.332	97,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.	4.552.695.801	1.138.173.950	1.365.808.740	1.821.078.320	227.634.790	1.117.696.386	1.341.235.663	1.788.314.218	223.539.277	4.470.785.544	98,20	Dinas Lingkungan Hidup			
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai	2.466.917.410	616.729.353	740.075.223	986.766.964	123.345.871	615.910.513	739.092.615	985.456.820	123.182.103	2.463.642.050	99,87	Dinas Pangan			
		20.201.829.793	5.050.457.448	6.060.548.938	8.080.731.917	1.010.091.490	4.786.713.403	5.744.056.083	7.658.741.444	957.342.681	19.146.853.611	94,78	Dinas Pertanian			

No	Sasaran	Pagu Anggaran	TRIWULAN				REALISASI				Jumlah	Capaian	Penanggung Jawab			
			RENCANA AKSI				Realisasi Serapan Anggaran									
			I	II	III	IV	I	II	III	IV						
6	tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan;	5.313.281.185	1.328.320.296	1.593.984.356	2.125.312.474	265.664.059	1.052.969.631	1.263.563.557	1.684.751.410	210.593.926	4.211.878.524	79,27	Dinas Koperasi dan UMKM			
		3.262.063.847	815.515.962	978.619.154	1.304.825.539	163.103.192	782.159.735	938.591.682	1.251.455.576	156.431.947	3.128.638.941	95,91	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu			
		2.901.128.116	725.282.029	870.338.435	1.160.451.246	145.056.406	717.946.559	861.535.871	1.148.714.494	143.589.312	2.871.786.236	98,99	Dinas Pariwisata			
		3.058.122.284	764.530.571	917.436.685	1.223.248.914	152.906.114	757.112.973	908.535.568	1.211.380.757	151.422.595	3.028.451.892	99,03	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
		8.087.181.836	2.021.795.459	2.426.154.551	3.234.872.734	404.359.092	1.876.028.511	2.251.234.213	3.001.645.617	375.205.702	7.504.114.042	92,79	Dinas Perikanan dan Kelautan			
7	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha.	6.237.977.240	1.559.494.310	1.871.393.172	2.495.190.896	311.898.862	1.427.277.086	1.712.732.503	2.283.643.337	285.455.417	5.709.108.343	91,52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	6.017.151.216	1.504.287.804	1.805.145.365	2.406.860.486	300.857.561	1.309.241.646	1.571.089.975	2.094.786.634	261.848.329	5.236.966.584	87,03	BAPPEDA			
		6.711.687.000	1.677.921.750	2.013.506.100	2.684.674.800	335.584.350	1.669.511.250	2.003.413.500	2.671.218.000	333.902.250	6.678.045.000	99,50	Inspektorat Daerah			
		29.005.822.237	7.251.455.559	8.701.746.671	11.602.328.895	1.450.291.112	7.199.677.668	8.639.613.202	11.519.484.269	1.439.935.534	28.798.710.673	99,29	Sekertariat Daerah			
9	Meningkatkan transparasi dan kualitas	151.566.419.687	37.891.604.922	45.469.925.906	60.626.567.875	7.578.320.984	35.269.814.956	42.323.777.947	56.431.703.930	7.053.962.991	141.079.259.824	93,08	Badan Keuangan			
		2.526.616.109	631.654.027	757.984.833	1.010.646.444	126.330.805	622.644.971	747.173.966	996.231.954	124.528.994	2.490.579.885	98,57	Dinas Pendapatan			

No	Sasaran	Pagu Anggaran	TRIWULAN				REALISASI				Jumlah	Capaian	Penanggung Jawab			
			RENCANA AKSI				Realisasi Serapan Anggaran									
			I	II	III	IV	I	II	III	IV						
pelayanan public		3.614.671.492	903.667.873	1.084.401.448	1.445.868.597	180.733.575	901.901.146	1.082.281.375	1.443.041.833	180.380.229	3.607.604.582	99,80	BKSDM			
		21.592.790.667	5.398.197.667	6.477.837.200	8.637.116.267	1.079.639.533	5.312.291.913	6.374.750.295	8.499.667.060	1.062.458.383	21.249.167.651	98,41	DPRD			
		16.728.476.810	4.182.119.203	5.018.543.043	6.691.390.724	836.423.841	4.100.172.310	4.920.206.771	6.560.275.695	820.034.462	16.400.689.238	98,04	Kecamatan			
		761.220.315.727									721.923.732.864	94,84				

Akuntabilitas anggaran dimulai sejak proses penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan proses efisiensi anggaran selama proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024. Saat proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024.

Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil verifikasi atas usulan perangkat daerah oleh Tim Verifikasi dengan mempertimbangkan:

- 1) Realisasi kinerja dan anggaran tahun sebelumnya
- 2) Proses bisnis pencapaian target RPJMD
- 3) Pencapaian indicator SPM dan SDGs,
- 4) Hasil musrenbang dan
- 5) Pokok Pokok Pikiran DPRD.

Dari tabel tersebut, didapat bahwa Realisasi Rp. **740.069.267.108**, daya serap penggunaan anggaran **94,23%** Realisasi anggaran pendukung sasaran daerah pada tahun 2024.

BAB IV

P E N U T U P

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 merupakan gambaran bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2024 sebagai tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah, dapat menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dalam target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Implementasi proses bisnis dalam penyusunan perencanaan anggaran menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja terhadap beberapa indikator yang tercantum dalam RPD 2023-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 ini disajikan, Secara garis besar disusun dalam rangka untuk menjadi acuan perbaikan penyempurnaan pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya serta menjadi acuan dalam menentukan program prioritas serta strategis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat di masa-masa mendatang.